

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN PINRANG
2009

Kerjasama
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
dengan
Bappeda & PM Kabupaten Pinrang

<http://pinrangkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	3
1.4. Sistematika Penulisan	4.....
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Konsep dan Definisi	5
2.2. Metode Penghitungan	9
BAB III. KONDISI WILAYAH	17
3.1. Geografi	17
3.2. Penduduk	18
3.3. Perekonomian	19
BAB IV. KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA	23
4.1 <i>Shorfall</i> Pembangunan Manusia	24
4.2 Bidang Kesehatan	26

4.3. Bidang Pendidikan	28
4.4. Indeks Daya Beli	33
4.5. Pengeluaran Rumah Tangga	34
4.6. Fasilitas Perumahan	35

BAB V. TENAGA KERJA

5.1. Angkatan Kerja	41
5.2. Tingkat Pengangguran	42
5.3. Pendidikan Angkatan Kerja	43
5.4. Produktifitas Pekerja	45

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	47
6.1. Kesimpulan	47
6.2. Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Beberapa Indikator Kependudukan dan Ekonomi Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	21
Tabel 3.2 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009.....	22
Tabel 4.1 Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Terdekat Tahun 2005-2009.....	37
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Menurut Komponennya Tahun 2005-2009.....	37
Tabel 4.3 Indikator Pendukung Menurut Jenis Indikator Kabupaten Pinrang Tahun 2004-2009.....	38
Tabel 4.4 PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009.....	39
Tabel 5.1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK di Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	41
Tabel 5.2 Perbandingan Struktur Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009...	43
Tabel 5.3 Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Kabupaten Pinrang Tahun 2009.....	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	18
Grafik 3.2	Perbandingan PDRB Perkapita Beberapa Kabupaten Pada Tahun 2004-2009.....	20
Grafik 4.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009.....	25
Grafik 4.2	Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2005 dan 2009.....	25
Grafik 4.3	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	26
Grafik 4.4	Daya Tampung Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	31
Grafik 4.5	Proporsi Alokasi Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan Lainnya Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	33
Grafik 4.6	Indeks Paritas Daya Beli Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009.....	33
Grafik 4.7	Perbandingan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009.....	35
Grafik 4.8	Sumber Air Bersih Kabupaten Pinrang Tahun 2009.....	36
Grafik 4.9	Sumber Penerangan Listrik Kabupaten Pinrang Tahun 2009.....	36
Grafik 5.1	Tingkat Pengangguran Kabupaten Pinrang dan Provinsi Selatan Tahun 2005-2009.....	43
Grafik 5.2	Struktur Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009	43
Grafik 5.3	Penduduk yang Bekerja Dalam Seminggu Tahun 2009	44

BAB II METODOLOGI

2.1. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang akan dijelaskan berikut ini merupakan konsep yang telah disepakati dan direkomendasi oleh badan dunia yaitu UNDP. Batasan baku ini diperlukan agar pemahaman tentang suatu indikator atau pengukuran pada suatu masalah mempunyai determinan yang sama. Konsep dan definisi yang dimaksud, sebagai berikut;

- a) Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan angka yang menggambarkan keadaan tentang tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain angka tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan yang bersifat agregat/komposit. komposit artinya dihitung berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (*purchasing power parity*). Berdasarkan rekomendasi UNDP, nilai IPM bernilai 0 (nol) hingga 100. Dimana nilai bergerak mendekati 100 diinterpretasikan sebagai adanya pemberdayaan manusia semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati 0 (nol). Nilai IPM dibawah 50 dikategorikan 'sedang', nilai 51-79 dikategorikan 'menengah' dan di atas 79 dikategorikan 'tinggi'.
- b) Angka harapan hidup penduduk adalah jumlah tahun yang dapat diharapkan seseorang masih hidup. Angka ini mencerminkan status

kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang kesehatan. Perhitungan angka harapan hidup di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tidak langsung, hal ini dilakukan karena registrasi vital penduduk belum berjalan dengan baik. Badan Pusat Statistik menghitung angka harapan hidup menggunakan pendekatan anak lahir hidup dan anak yang masih hidup. Estimasi angka tersebut menggunakan model *West Coale-demeny Trussell equations* (program mortpak-lite).

- c) Angka melek huruf adalah angka yang memberikan informasi tentang kemajuan pendidikan suatu bangsa/ daerah, serta adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

$$abk = \frac{bbt_{15+}}{pop_{15+}} \times 100 \%$$

Keterangan:

amh = angka melek huruf orang dewasa

bbt_{15+} = penduduk yang dapat membaca dan menulis berumur 15 tahun ke atas

pop_{15+} = jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

- c) Rata-rata lama bersekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah, semakin tinggi angka lama bersekolah maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai.

$$\bar{x}_{ls} = \sum_{i=1}^n \frac{pop_{sek}^i}{pop_i}$$

Keterangan :

x_{ls} = rata-rata lama bersekolah

pop_{sek} = jumlah tahun bersekolah penduduk

pop = jumlah penduduk

- d) Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah seluruh nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi (buruh, kewiraswastaan, modal, dan barang modal) di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan faktor-faktor produksi itu. Jadi PDRB merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto dari setiap sektor kegiatan dalam suatu periode tertentu di suatu wilayah.

$$pdrb = \sum_{i=1}^9 ntb_i$$

Keterangan :

$pdrb$ = produk domestik regional bruto

ntb_i = nilai tambah bruto sektor ke-i

i = sektor kegiatan usaha ke-i, $i = 1 \dots 9$

- 📖 Nilai tambah bruto adalah nilai manfaat suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi, atau secara sederhana adalah nilai produksi/output dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasil produksi/ output (biaya antara).
- 📖 Nilai produksi/ output adalah penilaian atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Biaya antara

adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses penciptaan barang dan jasa dalam suatu periode produksi.

- 📖 Penilaian barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan harga konstan tahun 2000 dan tahun berjalan. Atas dasar harga berlaku adalah penilaian suatu barang dan jasa pada saat terjadinya transaksi atau *current price*, dan dinilai dalam Rupiah. Atas dasar harga konstan adalah penilaian suatu barang dan jasa dengan suatu harga yang tetap. Dalam hal ini, penilaian dilakukan dengan harga barang dan jasa pada tahun 2000.

$$ntb_i = o_i - ba_i$$

Keterangan :

ntb = nilai tambah bruto

O = produksi/output barang dan jasa

ba = biaya antara

i = kegiatan usaha ke-i, i = 1 .. n

- 📖 Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kuantum produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu (dinilai dalam harga konstan).

$$r_{eko} = \frac{pdrb_k^n}{pdrb_k^{n-1}} \times 100\% - 100\%$$

Keterangan :

r_{eko} = pertumbuhan ekonomi

$pdrb_k^n$ = pdrb atas dasar harga konstan tahun ke-n

$pdrb_k^{n-1}$ = pdrb atas dasar harga konstan tahun ke-n-1

📖 PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

$$pdrb.kapita = \frac{pdrb}{pop_{med}}$$

Keterangan :

Pdrb,kapita = pdrb per kapita

pdrb = produk domestik regional bruto

pop_{med} = jumlah penduduk pertengahan tahun

- e) Susenas adalah singkatan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kegiatan survei rumah tangga tersebut telah dilakukan sejak tahun 1958 hingga kini, format daftar isian telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembangunan di Indonesia. Sejak tahun 1993, ruang lingkungannya diperluas hingga memungkinkan dapat memperkirakan populasi hingga wilayah kabupaten/ kota. Keterangan yang dikumpulkan meliputi keterangan individu/ perorangan dan rumah tangga. Keterangan individu mencakup keterangan pendidikan, kesehatan, fertilitas, tenaga kerja, dan pendapatan upah/gaji. Sedangkan keterangan rumah tangga mencakup keterangan fasilitas perumahan dan pengeluaran rumah tangga.

2.2. Metode Perhitungan

Untuk memperoleh angka indeks pembangunan manusia dibutuhkan beberapa proses pengolahan dan perhitungan, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Indeks Pembangunan Manusia, dihitung melalui indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli “*Purchasing Power Parity*” atau PPP. Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut;

$$IMP = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \times 100$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks daya beli

- b) Indeks Harapan Hidup, dihitung berdasarkan angka harapan hidup sejak seseorang dilahirkan dengan mempertimbangkan angka harapan hidup terendah dan tertinggi (UNDP). Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut;

$$X_1 = \frac{ahh - 25}{85 - 25} \times 100$$

Keterangan :

X_1 = Indeks harapan hidup

ahh = angka harapan hidup

25 = nilai terendah

85 = nilai tertinggi

- 📖 Angka Harapan Hidup, dapat dilakukan/ diperoleh melalui suatu paket program Mortpaklite dengan meng-input data hasil susenas rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup hingga refrensi survei per wanita yang berumur 15-49 tahun (kelompok umur lima tahunan). Hasil dari Mortpaklite tersebut tersaji beberapa metode pendekatan, metode yang sesuai dengan keadaan

fertilitas/ mortalitas di Indonesia adalah model *West Coale-demeny Trussell equations*. Kemudian, untuk mendapatkan hasil angka harapan hidup yang lebih baik dirata-ratakan pada kelompok umur 20-35 tahun, demikian pula dengan waktu rujukan “*reference date of life expectancy at birth*”.

- Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*children ever born*), sebagai berikut;

$$Ralh = \frac{\sum_{i=1}^7 alh_i}{\sum_{i=1}^7 w_i}$$

Keterangan :

Ralh = rata-rata anak lahir hidup

alh = anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu ke-*i*

w = wanita menurut kelompok umur ke-*i*

i = kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34;35-39;40-44;45-49

- Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang masih hidup (*children surviving*), sebagai berikut;

$$Ramsh = \frac{\sum_{i=1}^7 amsh_i}{\sum_{i=1}^7 w_i}$$

Keterangan :

Ramsh = rata-rata anak yang masih hidup

amsh = anak yang masih hidup menurut kelompok umur ibu ke-*i*

w = wanita menurut kelompok umur ke-*i*

i = kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34;35-39;40-44;45-49

- c) Indeks Pendidikan, dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama bersekolah (baca: konsep/definisi), yang masing-masing besarnya proporsi dua banding satu. Rumus untuk mendapatkan angka tersebut, sebagai berikut;

$$x_2 = \frac{2x_{2.1} + x_{2.2}}{3} \times 100$$

Keterangan :

X_2 = Indeks pendidikan

$X_{2.1}$ = Indeks melek huruf

$X_{2.2}$ = Indeks rata-rata lama sekolah

- 📖 Indeks Melek Huruf; diperoleh dengan cara membandingkan angka melek huruf hasil perhitungan di suatu daerah tertentu dengan standar UNDP. Rumusnya sebagai berikut;

$$x_{2.1} = \frac{amh - 0}{100 - 0} \times 100$$

Keterangan :

$X_{2.1}$ = Indeks melek huruf

amh = angka melek huruf

0 = angka melek huruf terendah

100 = angka melek huruf tertinggi

- 📖 Indeks Rata-rata lama bersekolah, cara memperolehnya mirip dengan indeks melek huruf, rumusnya sebagai berikut;

$$x_{2.2} = \frac{rls - 0}{15 - 0} \times 100$$

Keterangan :

$X_{2.2}$ = Indeks rata-rata lama sekolah

rls = rata-rata lama bersekolah

0 = angka melek huruf terendah

15 = angka melek huruf tertinggi

Sebelum perhitungan di atas, dalam pengolahan data susenas, pada keterangan pendidikan diperlukan skor/ konversi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang, sebagai berikut;

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Konversi (Tahun)
1. Tidak pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar	6
3. SLTP	9
4. SLTA/SMU	12
5. Diploma I	13
6. Diploma II	14
7. Akademi/Diploma III	15
8. Diploma IV/Sarjana	16
9. Magister (S2)	18
10. Doktor (S3)	21

- d) Indeks Daya Beli, “*Purchasing Power Parity*” (PPP) diharapkan sebagai proxy terhadap kehidupan layak bagi penduduk. Diberbagai negara menggunakan angka pendapatan per kapita sebagai proxy tersebut, akan tetapi di Indonesia belum dapat mempublikasikan angka pendapatan per kapita pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara berkala. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan data. Data yang dapat dipublikasikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah pendapatan regional per kapita. Dimana kedua indikator

tersebut sangat berbeda, dan perbedaan kedua indikator itu tidak dijelaskan dalam bahasan ini. Di Indonesia untuk memperoleh tingkat daya beli digunakan suatu paket komoditas yang terdiri dari 27 komoditas yang diperoleh dari Susenas pada keterangan Pengeluaran Rumah Tangga. Rumus Indeks Daya Beli (PPP) sebagai berikut;

$$X_3 = \frac{ppp^k - 360}{732.72 - 300} \times 100$$

Keterangan :

X_3 = Indeks daya beli

ppp^k = paritas daya beli hasil koreksi (rumus: Atkinson)

360 = perkiraan ppp maksimum hingga tahun 2018

300 = perkiraan garis kemiskinan (metode baru)

732.72 = nilai maksimum ppp

Untuk memperoleh ppp^k , perhitungannya melalui beberapa tahap/ proses, sebagai berikut;

☞ **Persiapan data:**

1. Pengeluaran rumah tangga untuk 27 komoditas dalam volume (berat/ unit/ butir dsb) dan rupiah.
2. Indeks harga konsumen (IHK); adalah angka yang menggambarkan perubahan secara umum harga-harga pada waktu dan daerah tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu mencerminkan terjadi inflasi atau deflasi.

3. Jumlah penduduk.

☞ Proses Perhitungan :

1. Pengeluaran per kapita adalah jumlah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk (Y_1).
2. Pengeluaran per kapita riil adalah pengeluaran per kapita dikalikan dengan angka IHK (Y_2).
3. Menghitung PPP

$$PPP = \frac{\sum E(i, j)}{\sum P(i, j)Q(i, j)}$$

Keterangan :

$E_{(i,j)}$ = pengeluaran untuk komoditi ke-j di kab/kota ke-i

$P_{(i,j)}$ = harga komoditi ke-j di Jakarta Selatan

$Q_{(i,j)}$ = volume komoditi ke-j (unit) yang dikonsumsi di kab/kota

Catatan : Bahwa harga standar untuk se Indonesia adalah Jakarta Selatan, yang berdasarkan 27 komoditi

4. Pengeluaran per kapita riil dibagi dengan ppp, untuk mendapatkan kekuatan daya beli per kabupaten/ kota berdasarkan paket komoditas, (Y_3).
5. Kekuatan daya beli (Y_3) perlu dilakukan penyesuaian dengan formula Atkinson :

$$\begin{aligned}
 ppp^k &= C(i) && \text{jika } C(i) \leq Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C(i) \leq 2Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} + 3(C(i) - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C(i) \leq 3Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z)^{(1/2)} + 3(C(i) - 2Z)^{(1/3)} + 4(C(i) - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C(i) \leq 4Z \\
 &\text{dst.}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = batas tingkat pengeluaran ditetapkan secara arbiter Rp 1 500 per kapita hari.

- e. *Reduksi Shortfall*, Mengukur keberhasilan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat.

$$shortfall = \left[\frac{ipm^t - ipm^{t-1}}{100 - ipm^{t-1}} \times 100\% \right]^{1/n}$$

Keterangan :

Ipm = Indeks Pembangunan Manusia

t = tahun pada t (tahun terakhir/ sekarang)

t = tahun pada t-1 (tahun awal/ sebelumnya)

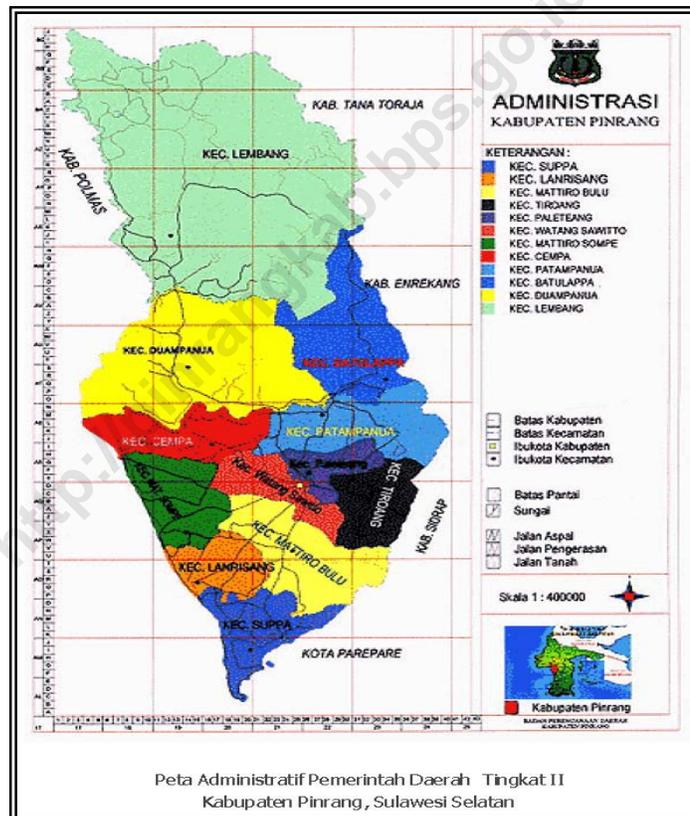
n = periode waktu pada t-1 dan t

100 = konstanta, pencapaian kondisi ideal ipm

BAB III KONDISI WILAYAH

3.1. Geografis

Secara geografis Kabupaten Pinrang terletak: $3^{\circ}9'13''$ – $4^{\circ}10'30''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'30''$ – $119^{\circ}47'20''$ Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Provinsi Sulawesi, Kota Makassar sekitar 182 kilometer ke arah Utara. Letak kabupaten ini berbatasan; di Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, di Timur dengan Enrekang dan Sidrap, Selatan dengan Kota Pare-Pare, dan Barat dengan Sulawesi Barat Kabupaten Polewali



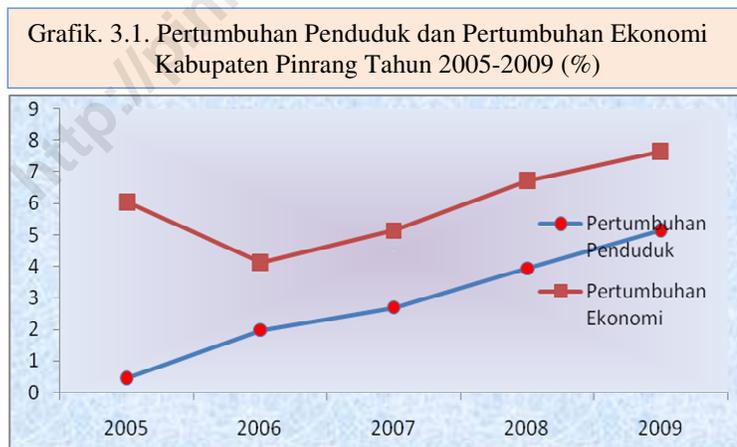
Mamasa dan Selat Makassar. Dan Luas wilayah daratan secara administrasi sekitar 1.961,77 kilometer persegi.

Ketinggian dari permukaan laut, terdapat 3 kecamatan yang berada di dataran tinggi yaitu Duampanua, Batulappa dan Lembang. Sedangkan kecamatan yang mempunyai beberapa desa berada pada ketinggian di atas 150 meter adalah Suppa, Mattirobulu, dan Paleteang. Kecamatan yang lain dapat dikategorikan dengan dataran rendah.

Jenis tanah pada umumnya adalah jenis tanah Aluvial kelabu kekuningan, Brown forest soil, Fodsolik coklat, dan Regosol kelabu. Jenis tanah tersebut tersebar di hamper semua daerah kecamatan di Kabupaten Pinrang.

3.2. Penduduk

Jumlah penduduk dalam periode lima tahun terakhir memperlihatkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun



sebesar 2,84 persen. Hal itu dapat dilihat pada pertengahan tahun 2005 terdapat 335.352 jiwa dan menjadi 351.042 jiwa pada pertengahan tahun 2009 (Proporsi Susenas terhadap DAU).

Jumlah penduduk yang sebanyak itu tersebar pada 12 kecamatan atau 65 desa dan 39 kelurahan; dengan kepadatan penduduk per kilometer persegi sekitar 179 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Paleteang dan Watangsawitto. Kecamatan Paleteang merupakan salah satu sentra perkebunan dan kehutanan, sedangkan Watangsawitto merupakan ibukota Kabupaten Pinrang.

3.3. Perekonomian

Potensi ekonomi masih tertumpuh pada sektor Pertanian terutama sub sektor Tanaman bahan makanan dan Perikanan. Sektor Pertanian mempunyai peranan sekitar 56,50 persen dari total perekonomian (pada tahun 2009). Sektor kedua terbesar adalah Sektor Perdagangan terutama perdagangan retail, yakni sebesar 11,76 persen.

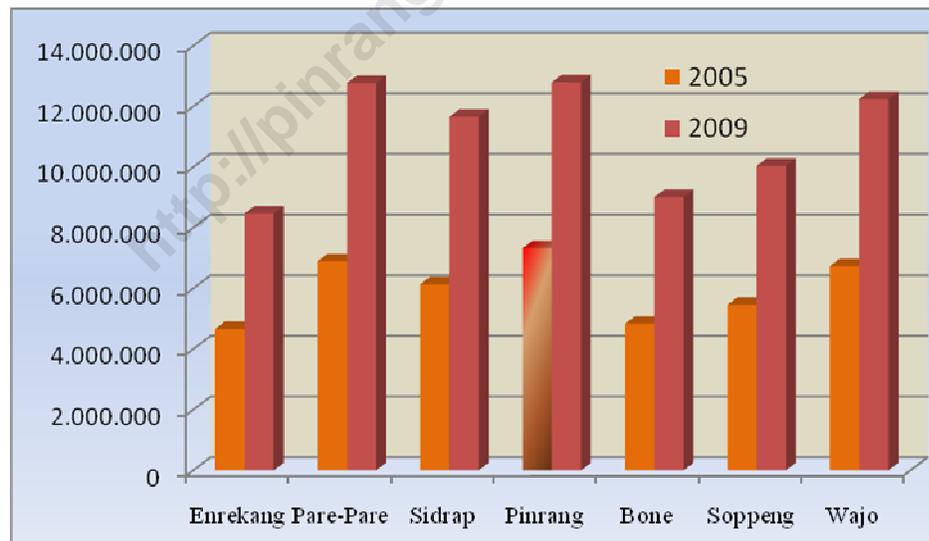
Pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2009 sebesar 7,65 persen relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 yang sebesar 6,73 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun periode tahun 2005 hingga 2009 tercatat sebesar 5,94 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diukur berdasarkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2000.

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar 4.493,0 milyar rupiah yang relatif jauh lebih besar

bila dibandingkan pada tahun 2005 yang sebesar 2.456,1 milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan, dalam tahun 2009 sebesar 2.384,3 milyar rupiah dan 1.895,7 milyar rupiah pada tahun 2005.

Produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Pinrang pada tahun 2005 tercatat sekitar 7,3 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan pembangunan ekonomi, yang pada tahun 2009 menjadi 12,8 juta rupiah. Angka Produk domestik regional bruto per kapita tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan beberapa kabupaten terdekat seperti Kabupaten Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, dan Soppeng. Dan bahkan angka PDRB Perkapita Kabupaten Peinrang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang sekitar 12,6 juta rupiah.

Grafik. 3.2. Perbandingan PDRB Per Kapita Beberapa Kabupaten Pada tahun 2005 dan 2009 (dalam Rupiah)



Tabel. 3.1. Indikator Kependudukan dan Ekonomi Pinrang Tahun 2005-2009

Jenis Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Penduduk						
a Jumlah (Jiwa)	335.352	340.439	342.852	346.988	351.042	343.335
b Pertumbuhan (%)	0,45	1,97	2,70	3,93	5,15	2,84
c Kepadatan/ km2	171	174	175	177	179	175
2 Perekonomian						
a Struktur (%)						
- Pertanian	62,24	60,05	59,30	57,88	56,50	59,19
- Perdagangan	10,61	11,02	11,19	11,50	11,76	11,22
- Lainnya	27,15	28,93	29,51	30,63	31,74	29,59
b PDRB (Milyar Rp)						
- Atas dasar harga berlaku	2.456,1	2.685,1	3.046,9	3.737,0	4.493,0	3.283,6
- Atas dasar harga konstan	1.895,7	1.973,9	2.075,2	2.214,9	2.384,3	2.108,8
c Pertumbuhan Ekonomi	6,04	4,12	5,14	6,73	7,65	5,94
d PDRB Per Kapita (Rp.000)	7.324,0	7.887,2	8.886,9	10.769,9	12.798,9	9.533

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Tabel. 3.2. Produk Dometik Regional Bruto Per Kapita Atas dasar Harga Berlaku Beberapa Daerah Sekitar Kabupaten Pinrang, 2005-2009 (dalam Rupiah)

Daerah	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Enrekang	4.663.461	5.228.125	6.103.457	7.163.352	8.470.191	6.325.717
Pare-Pare	6.895.533	7.740.704	9.143.191	11.044.881	12.774.575	9.519.777
Sidrap	6.132.870	7.006.366	7.869.481	9.596.593	11.660.748	8.453.212
Pinrang	7.323.997	7.887.199	8.886.852	10.769.886	12.798.916	9.533.370
Bone	4.833.726	5.541.502	6.310.935	7.579.164	9.009.719	6.655.009
Soppeng	5.456.583	6.131.382	6.972.591	8.487.215	10.041.073	7.417.769
Wajo	6.733.551	7.732.588	8.690.771	10.371.241	12.241.170	9.153.864
Sulsel	6.895.138	7.982.347	8.996.056	10.908.767	12.632.537	9.482.969

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

BAB IV

KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas hidup. Umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu modal untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kesehatan, atau pun indikator-indikator lain. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia, akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal ini kinerja ekonominya. Dengan kata lain, bahwa peningkatan kualitas modal manusia akan sekaligus memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

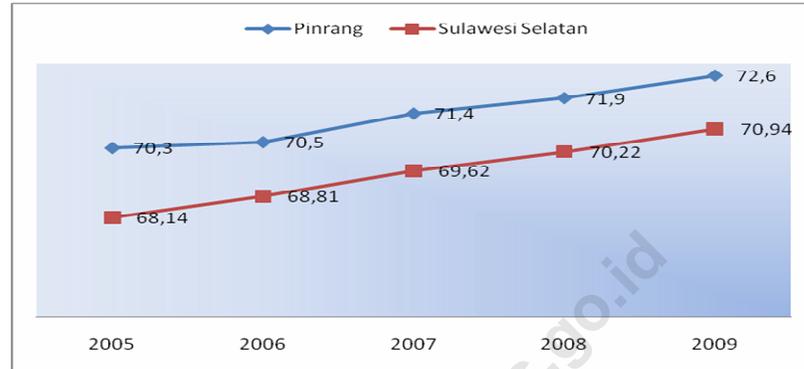
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah/wilayah. Jarak yang harus ditempuh—*shortfall*—suatu wilayah mempunyai nilai maksimum 100. Artinya jika suatu wilayah telah mencapai angka 100 maka pembangunan manusia secara keseluruhan telah tercapai. Jadi suatu wilayah yang mempunyai angka IPM yang masih rendah atau masih jauh dari angka 100, artinya jarak yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari pembangunan manusia dapat dikatakan masih jauh. Dan tentunya hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua daerah/ wilayah/ Negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penggerak utama harus mengupayakan pemberdayaan manusia sehingga dapat memperpendek jarak ke tujuan.

4.1. Shortfall Pembangunan Manusia

Hasil yang diperoleh, pada tahun 2005 indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang sebesar 70,3 dan pada tahun 2006, angka tersebut meningkat menjadi 70,5. Kinerja pembangunan manusia tersebut pada tahun 2007, menjadi 71,4 hingga pada tahun 2008, indeksnya telah mencapai 71,9. Dan pada tahun 2009 angkanya meningkat menjadi 72,6. Selama periode tahun 2005 hingga 2009, angka indeks pembangunan manusia telah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 1,06 (reduksi *short fall*). Fakta ini memberikan petunjuk bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pinrang meningkat cukup drastis, yang termasuk kabupaten dengan peningkatan IPM tercepat di Sulawesi

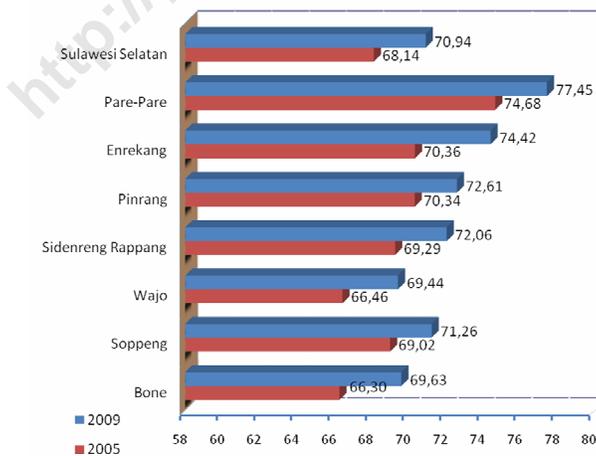
Selatan. Dan suatu hal lagi yang menarik bahwa selain angka IPM Kabupaten Pinrang yang berada di atas angka provinsi juga perbedaan kecepatan perubahan yang semakin melebar.

Grafik 4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009



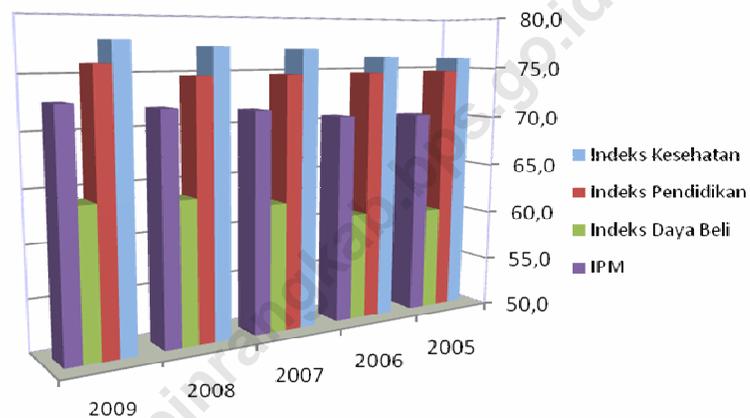
Perbandingan dengan beberapa kabupaten yang terletak atau berdekatan dengan Kabupaten Pinrang, seperti, Kota Pare-Pare dan Enrekang; maka pola kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang secara umum lebih mendorong meningkatnya pembangunan manusia.

Grafik 4.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Sekitarnya (Persentase) Tahun 2005 dan 2009



Fakta tersebut di atas merupakan cerminan meningkatnya angka indeks pada tiga komponen yang menjadi indikator pengukuran kinerja pembangunan manusia. Untuk jelasnya, akan diuraikan masing-masing komponen tersebut, yaitu pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang ekonomi atau daya beli. Namun sebelumnya bahwa dari ketiga komponen tersebut, indeks daya beli merupakan indeks yang terendah, Grafik.4.3.

Grafik 4.3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Menurut Komponennya Tahun 2005-2009 (Persentase)



4.2. Bidang Kesehatan

Tercapainya tujuan pembangunan dibidang kesehatan berupa derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan adanya; kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk; terse-lenggaranya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya-upaya dibidang kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta. Pemerintah dan swasta dalam memberikan upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan fasilitas kesehatan. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam usaha mencapai tujuan tersebut di atas, telah melakukan beberapa program seperti program pemerataan kesehatan, peningkatan status gizi, dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal ini adalah indeks harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka tersebut diharapkan dapat mencerminkan tingkat/ derajat kesehatan penduduk, karena apabila seseorang mempunyai derajat kesehatan yang baik maka ia mempunyai harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang derajat kesehatannya buruk.

a) Indeks Kesehatan

Seperti telah diuraikan dalam metodologi, bahwa indeks kesehatan merupakan angka harapan hidup yang memper-timbangkan standar yang direkomendasikan oleh UNDP. Dimana angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian bayi.

Berdasarkan hasil perhitungan di Kabupaten Pinrang, selama periode 2005-2009 angka indeks tersebut memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Rata-rata peningkatan per tahun (*reduction short fall*) sebesar 0,81 persen, yaitu dari 76,0 menjadi 77,9.

b) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup telah mengalami peningkatan dari 70,60 tahun pada 2005 menjadi 71,72 tahun pada 2009. Angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 69,80 tahun pada keadaan 2009. Angka harapan hidup Kabupaten Pinrang meningkat rata-rata per tahun 0,53 tahun.

c) Fasilitas Kesehatan

Sebagai gambaran umum keadaan fasilitas kesehatan dalam uraian berikut akan digunakan rasio sarana kesehatan (rumah sakit dan puskesmas, termasuk puskesmas pembantu dan keliling) dan tenaga medis (dokter, bidan dan perawat/ paramedis) terhadap 10 ribu penduduk sebagai indikator. Keadaan tahun 2005 hingga 2009 bidang kesehatan cenderung belum mengalami perubahan, yaitu sebesar 2,3. Artinya dalam 10 ribu penduduk terdapat 2,3 fasilitas kesehatan atau setiap fasilitas kesehatan tersebut di atas untuk 5.208 penduduk. Sedangkan ketersediaan jumlah dokter dan tenaga medis selama periode yang sama juga belum mengalami perubahan yang mencolok.

4.3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan, dan juga sebagai salah satu pilar utama agar penduduk dapat memper-dayakan dirinya berpartisipasi dalam pembangunan.

Pendidikan disini tidak diartikan hanya pendidikan formal saja, akan tetapi dalam arti lebih luas, termasuk pendidikan berpolitik. Pendidikan politik tidak mesti diisolasi dari yang lainnya, akan tetapi menjadi salah satu unsur pendidikan yang penting agar penduduk dapat secara partisipatif menentukan serta menikmati hasil pembangunan. Namun disadari, indikator dasar tentang pendidikan politik sampai saat ini belum tersedia.

4.3.1 Indeks Pendidikan

Perhitungan angka indeks ini terdiri dari dua unsur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Kedua unsur tersebut akan dijelaskan kemudian.

Keadaan tahun 2009, kondisi pendidikan Kabupaten Pinrang memperlihatkan peningkatan dari empat tahun sebelumnya, yakni sebesar 75,9. Dan apabila angka tersebut dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan maka indeks pendidikan Kabupaten Pinrang relatif lebih tinggi, (Sulsel 74,5 tahun 2009).

4.3.2 Angka Melek Huruf

Jumlah angka melek huruf dihitung berdasarkan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Dalam periode 2005-2009, di Kabupaten Pinrang memperlihatkan bahwa jumlah mereka yang dapat membaca dan menulis rata-ratanya sebesar 89,23 persen. Apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, maka angka melek huruf

Kabupaten Pinrang relatif masih lebih baik (Sulawesi Selatan : 86,02 persen).

4.3.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka ini sangat berguna untuk memonitor tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Interpretasinya, semakin tinggi angka tersebut maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.

Di Kabupaten Pinrang, keadaan lama bersekolah penduduk tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 2005. Namun demikian, angka rata-rata lama sekolah mengalami sedikit peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tersebut digambarkan oleh rata-rata lama bersekolah pada tahun 2009, yakni sebesar 7,2 tahun. Dengan kata lain pada tahun 2009, bahwa setiap penduduk mempunyai jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang sedang duduk di kelas 2. Angka ini masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan angka provinsi yang sebesar 7,4 tahun pada 2009.

4.3.4. Fasilitas Pendidikan

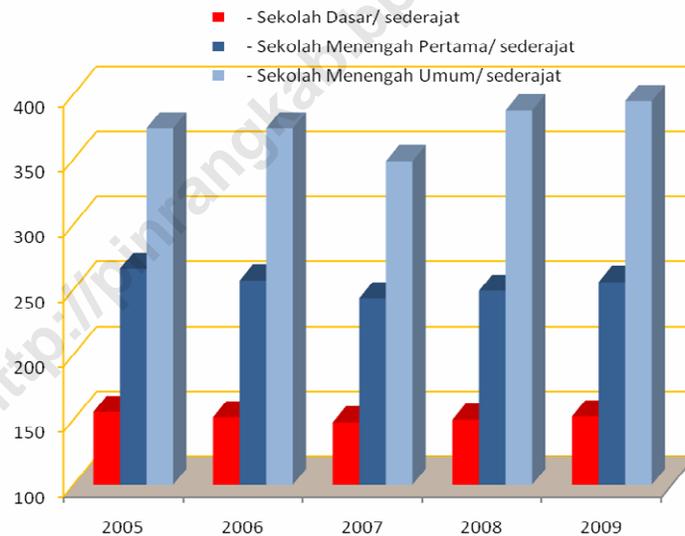


Fasilitas ini merupakan suatu syarat hampir mutlak yang harus tersedia. Ketersediaan fasilitas tersebut dapat berupa gedung sekolah, tenaga pengajar, ruang

kelas, laboratorium, ruang komputer dan perpustakaan serta ruang serba guna. Dalam bahasan ini akan digunakan indikator daya tampung sekolah (rasio murid terhadap sekolah) dan beban kerja seorang tenaga pengajar (rasio murid terhadap tenaga pengajar).

Daya tampung sekolah menurut jenjang pendidikan memperlihatkan bahwa pada sekolah dasar perbandingan jumlah murid per sekolah relatif sama selama periode 2005-2009. Pada tahun 2005 setiap sekolah mempunyai daya tampung 156 murid dan sedikit agak menurun pada tahun 2009 yang sekitar 153 murid.

Grafik 4.4. Daya Tampung Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009 (murid)



Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama memperlihatkan kecenderungan yang mirip dengan keadaan pada sekolah dasar, yakni 266 murid pada tahun 2005 menjadi 256

pada tahun 2009. Sedangkan pada jenjang pendidikan atas menunjukkan kecenderungan angka yang meningkat, yaitu 374 murid pada tahun 2005 meningkat menjadi 395 pada tahun 2009. Jika kita perhatikan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula daya tampungnya.

Beban kerja tenaga pengajar/ atau perbandingan antara jumlah murid terhadap guru; di sekolah dasar pada tahun 2005 sebesar 21 orang dan menjadi 14 orang murid per guru tahun 2009. Pada Sekolah menengah pertama keadaannya cenderung mirip dengan yang terjadi di sekolah dasar, yakni pada tahun 2005 sebesar 14 orang menjadi 12 orang pada tahun 2009. Namun, untuk jenjang sekolah menengah atas keadaannya cenderung meningkat. Secara umum dapat diartikan bahwa perbandingan tersebut semakin mengecil, yang dapat diinterpretasikan sebagai membaiknya keadaan pendidikan secara umum.

4.3.5. Bidang Ekonomi

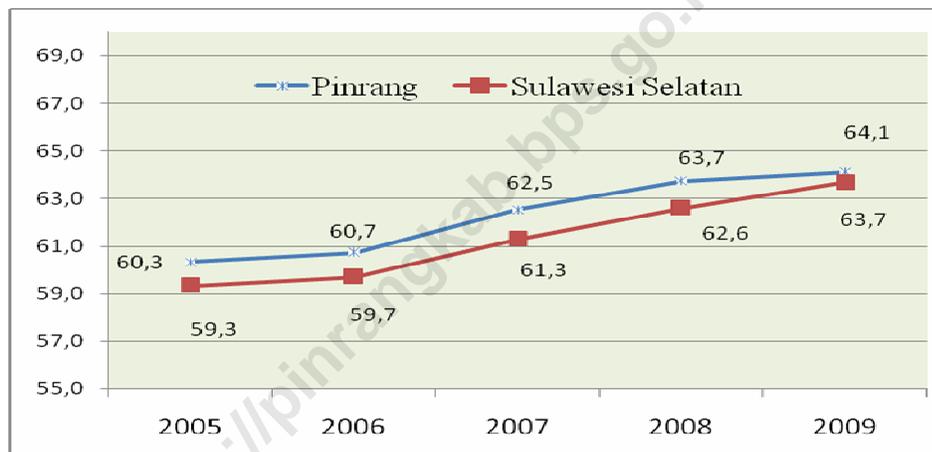
Dalam bidang ekonomi telah memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin membaik, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto per kapita, paritas daya beli dan dampak terhadap adanya perbaikan ekonomi. Dampak tersebut dapat dicerminkan oleh beberapa informasi pendukung seperti ketersediaan air bersih, listrik, dan konsumsi rumah tangga. Dalam bahasan berikut tidak dikemukakan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional

per kapita, karena hal tersebut telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

4.4. Indeks Daya Beli

Seperti telah dikemukakan dalam bab pendahuluan bahwa indeks daya beli merupakan gambaran kemampuan ekonomi penduduk. Kemampuan ini diperoleh dari pengeluaran konsumsi rumah tangga baik konsumsi makanan maupun non makanan, untuk lebih jelasnya baca bab pendahuluan.

Grafik 4.6 Indeks Paritas Daya Beli Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009 (%)



Pada keadaan 2005 paritas daya beli penduduk Kabupaten Pinrang sebesar Rp.621.1 ribu dan meningkat menjadi Rp.637,4 ribu pada tahun 2009. Keadaan itu, menghasilkan nilai indeks daya beli pada tahun 2005 sebesar 60,3 dan meningkat di tahun 2009 menjadi 64,1 persen. Dalam kurun waktu tersebut peringkat indeks daya beli telah mengalami lompatan yang sangat berarti. Dengan kata lain,

kenaikan paritas daya beli Kabupaten Pinrang termasuk daerah yang mempunyai peningkatan yang terbesar apabila dibandingkan dengan kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan nilai *shortfall* yang sebesar 2,04 persen.

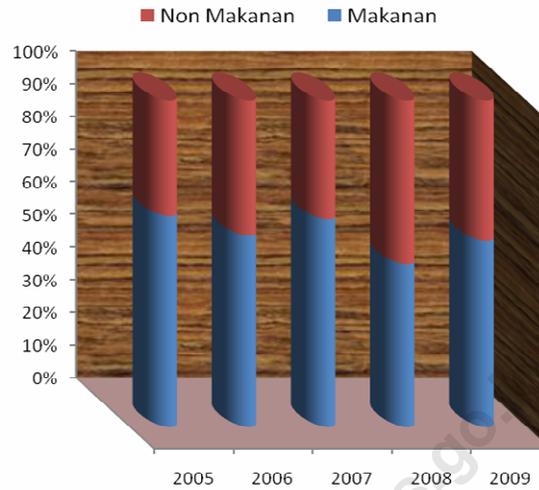
Indeks daya beli baik pada level provinsi maupun pada level kabupaten/ kota merupakan komponen yang terendah apabila dibandingkan dengan dua komponen lainnya. Pada tahun 2009, angka indeks daya beli Kabupaten Pinrang jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang terdekat/ sekitarnya termasuk tertinggi, demikian pula dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan.

4.5. Pengeluaran Rumah Tangga

Selama kurun waktu yang sama di atas, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan, memperlihatkan adanya kecenderungan yang terus mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan oleh hasil survei sosial ekonomi nasional pada keadaan tahun 2005 sebesar 776.8 ribu rupiah per rumah tangga sebulan dan meningkat menjadi 1.737.7 ribu rupiah pada tahun 2009. Dalam periode tersebut telah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 30,92 persen.

Perbandingan antara konsumsi makanan dan non makanan dalam kurun yang sama memperlihatkan persentase yang relatif sama. Secara rata-rata persentase konsumsi makanan mempunyai porsi yang relatif besar, fenomena ini terjadi bukan saja di Pinrang akan tetapi di Indonesia.

Grafik.4.7. Perbandingan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kabupaten Pinrang Tahun 2005-2009 (%)



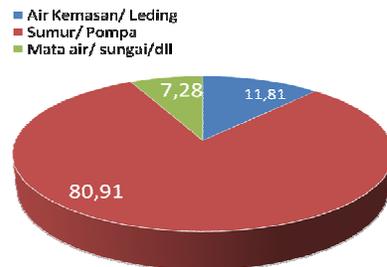
4.6. Fasilitas Perumahan

Salah satu cerminan adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga adalah tersedianya fasilitas air bersih dan penggunaan penerangan yang bersumber dari listrik. Berdasarkan penelitian Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2004 bahwa terdapat dua variabel yang sangat signifikan yaitu variabel lama bersekolah dan air bersih yang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan. Seperti diketahui bahwa ketersediaan air bersih merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi penduduk. Dengan ketidaktersediaan akan air bersih menjadi sumber penyakit misalnya desentri dan kolera.

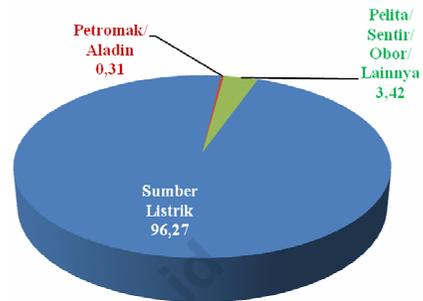
Di Kabupaten Pinrang, persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (bersumber dari air kemasan dan air leding)

selama periode yang sama sekitar 8,18 persen dari total rumah tangga. Atau dengan kata lain, terdapat 1 dari 10 rumah tangga yang mempunyai fasilitas air bersih.

Grafik.4.8. Sumber Air Bersih Pinrang Tahun 2009 (%)



Grafik.4.9. Sumber Penerangan Listrik Pinrang Tahun 2009 (%)



Fasilitas penerangan listrik dianggap dapat mempengaruhi tingkat pendidikan, karena berpengaruh terhadap rata-rata lama belajar atau membaca bahkan akses terhadap mas media. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas penerangan dari listrik dalam kurun waktu 2005-2008 rata-ratanya sebesar 90,18 %.

Tabel 4.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Terdekat
Tahun 2005-2009 (%)

Kabupaten/ Kota (terdekat)	2005			2006			2007			2008			2009			Shortfall 05-08 (%)
	IPM	Shortfall 04-05 (%)	Rank	IPM	Shortfall 05-06 (%)	Rank	IPM	Shortfall 06-07 (%)	Rank	IPM	Shortfall 07-08 (%)	Rank	IPM	Shortfall 08-09 (%)	Rank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1 Bone	66,30	0,56	19	67,82	0,76	15	68,34	0,25	16	68,96	0,30	16	69,63	0,32	16	2,15
2 Soppeng	69,02	0,30	11	69,33	0,15	11	70,26	0,44	10	70,76	0,24	11	71,26	0,24	11	1,93
3 Wajo	66,46	0,59	18	66,79	0,17	20	68,04	0,62	19	68,72	0,33	19	69,44	0,35	19	2,07
4 Sidenreng Rappang	69,29	0,29	10	69,99	0,33	9	71,18	0,57	9	71,74	0,26	8	72,06	0,15	8	2,08
5 Pinrang	70,34	0,67	7	70,53	0,09	8	71,43	0,43	8	71,91	0,22	7	72,61	0,33	7	1,97
6 Enrekang	70,36	0,22	6	71,38	0,48	6	73,32	0,90	4	73,76	0,20	4	74,42	0,30	4	2,39
7 Pare-Pare	74,68	0,14	2	75,53	0,38	2	76,47	0,41	2	76,97	0,22	2	77,45	0,21	2	2,22
8 Sulawesi Selatan	68,14	0,19	xx	68,81	0,32	xx	69,62	0,39	xx	70,22	0,29	xx	70,94	0,34	xx	2,06

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Tabel 4.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pinrang Menurut Komponennya Tahun
2005-2009 (%)

Indikator/ Komponen	2005	2006	2007	2008	2009	Perubahan 2005-2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kesehatan						
a. Angka Harapan Hidup	70,60	70,70	71,23	71,38	71,72	0,53
b. Indeks Kesehatan	76,0	76,2	77,1	77,3	77,9	0,81
2 Pendidikan						
a. Angka Melek Huruf	89,10	89,10	89,10	89,10	89,74	0,24
b. Rata-rata Lama Sekolah	6,9	6,9	6,9	6,9	7,2	1,62
c. Indeks Pendidikan	74,7	74,7	74,7	74,7	75,9	0,50
3 Hidup Layak						
a. Paritas Daya Beli	621,1	622,8	630,6	635,8	637,4	0,87
b. Indeks Daya Beli	60,3	60,7	62,5	63,7	64,1	2,04
IPM	70,3	70,5	71,4	71,9	72,6	1,06

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Tabel. 4.3
Indikator Pendukung Menurut Jenis Indikator Kabupaten Pinrang
Tahun 2005-2009 (%)

Jenis Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Bidang Kesehatan						
a. Rasio Fasilitas terhadap 10 ribu penduduk	2,1	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3
b. Rasio Tenaga Medis terhadap 10 ribu penduduk	10,6	9,8	12,1	11,7	8,9	10,6
c. Rasio Dokter terhadap Fasilitas	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5
2. Bidang Pendidikan (Depdikbud)						
a. Rasio murid terhadap sekolah						
- Sekolah Dasar/ sederajat	156	152	148	150	153	152
- Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	266	257	243	249	256	254
- Sekolah Menengah Umum/ sederajat	374	374	349	388	395	376
b. Rasio murid terhadap Guru						
- Sekolah Dasar/ sederajat	21	19	14	14	14	16
- Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	14	14	12	13	12	13
- Sekolah Menengah Umum/ sederajat	14	12	16	22	17	16
3. Fasilitas Perumahan Penduduk						
a. Rumah Tangga menggunakan Listrik (%)	...	89,74	94,58	88,07	96,27	92,17
b. Rumah Tangga menggunakan Air Bersih (%)	11,00	10,65	9,80	8,18	11,81	10,29
c. Pengeluaran Rumah Tangga/bulan (Rp.000)	776,8	992,4	1.014,5	1.566,0	1.737,7	1.217,5
- Konsumsi Makanan (Rp.000)	501,6	581,7	645,2	779,6	989,6	699,5
- Konsumsi Bukan Makanan (Rp.000)	275,2	410,7	369,4	786,4	748,1	517,9

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang

Keterangan : ... = data tak tersedia

Tabel. 4.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2005-2009

Kabupaten/ Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-Rata
1. Bone	4.833.726	5.541.502	6.310.935	7.579.164	9.009.719	6.655.009
2. Soppeng	5.456.583	6.131.382	6.972.591	8.487.215	10.041.073	7.417.769
3. Wajo	6.733.551	7.732.588	8.690.771	10.371.241	12.241.170	9.153.864
4. Sidrap	6.132.870	7.006.366	7.869.481	9.596.593	11.660.748	8.453.212
5. Pinrang	7.323.997	7.887.199	8.886.852	10.769.886	12.798.916	9.533.370
6. Enrekang	4.663.461	5.228.125	6.103.457	7.163.352	8.470.191	6.325.717
Sulawesi Selatan	6.895.138	7.982.347	8.996.056	10.908.767	12.632.537	9.482.969

BAB V

TENAGA KERJA

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi pekerjaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari – hari, aspek sosial terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap keberadaan/ eksistensi atas kemampuan dari individu, baik pengetahuan maupun keterampilan. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan dalam berusaha di semua sektor ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan itu sendiri.

Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya penduduk yang memasuki pasar kerja.

5.1. Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas baik yang terdiri dari mereka yang melakukan kegiatan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Tahun 2009, dari 247.875 penduduk usia kerja terdapat 149.148 angkatan kerja, dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 98.727 orang. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selama

periode 2005 hingga 2008; TPAK memperlihatkan kecenderungan yang terus membaik, hal itu tercermin dari nilainya pada 2005 yang sebesar 51,51 dan menjadi 60,17 persen. Walaupun kedua data tersebut sebenarnya tidak dapat secara langsung dapat dibandingkan, karena jenis survei berbeda dan umur penduduknya. (Tahun 2005 : Susenas dan Tahun 2006-2009 : Sakernas).

Tabel 5.1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Kabupaten Pinrang , 2005-2009

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	135.912	127.461	141.325	149.411	149.148
Bukan Angkatan Kerja	127.931	101.732	96.964	94.419	98.727
Total	263.843	229.193	238.289	243.830	247.875
TPAK (%)	51,51	55,61	59,31	61,28	60,17

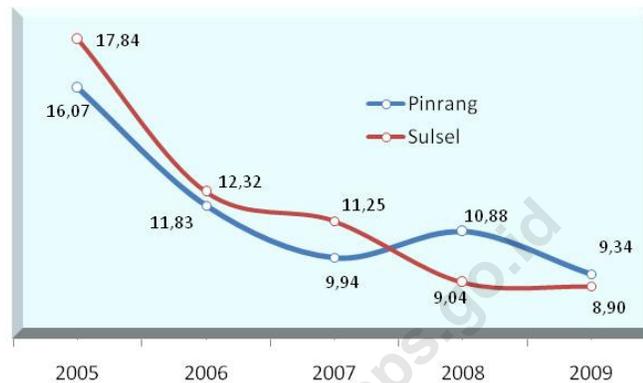
Catatan : Tahun 2005; Penduduk Usia 10 tahun ke atas, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional.
Tahun 2006-2009; Penduduk Usia 15 tahun ke atas, Survei Angkatan Kerja Nasional

5.2. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja usia 15 tahun ke atas yang sedang aktif mencari pekerjaan. Ketidakseimbangan antara permintaan akan lapangan kerja yang semakin meningkat dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas, merupakan masalah utama dalam pengangguran. Tingkat pengangguran (terbuka) penduduk Kabupaten Pinrang sekitar 9,34 persen pada tahun 2009. Angka tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pengangguran selama empat tahun terakhir. Tingkat pengangguran Kabupaten Pinrang lebih tinggi sedikit daripada tingkat pengangguran

Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pinrang tersebut apabila dirinci menurut pendidikannya maka mereka yang berpendidikan rendah masih sangat besar, lihat Grafik 5.1

Grafik 5.1 Tingkat Pengangguran Kabupaten Pinrang dan Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009

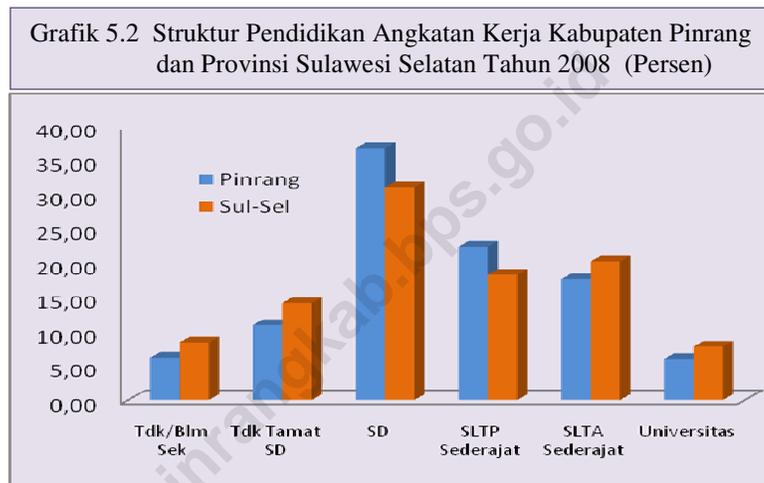


Keterangan : 2005, Susenas
2006-2009, Sakernas

5.3. Pendidikan Angkatan Kerja

Kualitas Pekerja dapat dicerminkan dari tingkat pendidikannya, pekerja yang berpendidikan tinggi diharapkan tingkat produktifitasnya akan lebih baik. Rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Pinrang berpendidikan rendah terlihat dari persentase pekerja yang tamat sekolah dasar ke bawah sebesar 50 persen, sedangkan yang berpendidikan yang pendidikan tinggi (Diploma/ Universitas) persentasenya sekitar 8 persen. Besarnya persentase jumlah pekerja yang berpendidikan rendah secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas pekerja.

Rendahnya produktifitas pekerja dapat dicerminkan oleh mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Kelompok pekerja ini biasa disebut dengan pengangguran terselubung, pada tahun 2009 persentasenya telah mencapai 45 persen dari total pekerja. Artinya jika terdapat 100 pekerja maka yang setengah pengangguran/ terselubung sebanyak 45 pekerja, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2008 yang sebesar 52 pekerja.

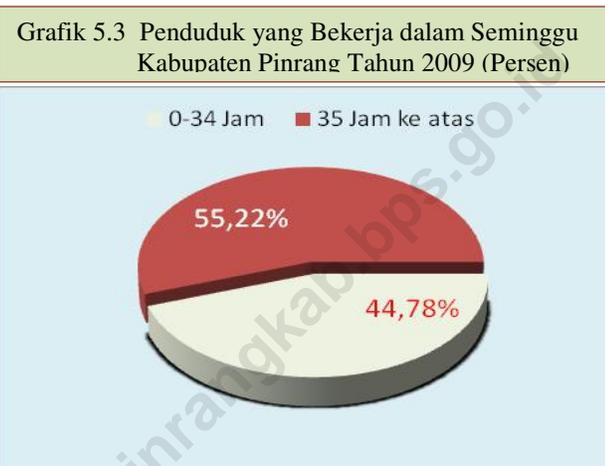


Tabel 5.2 Perbandingan Struktur Pendidikan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Uraian	Pinrang		Sul-Sel	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tidak/Belum Pernah sekolah	8.571	5,75	278.658	7,88
2. Tidak Tamat SD	25.252	16,93	704.327	19,91
3. SD	41.330	27,71	784.871	22,19
4. SLTP Sederajat	33.303	22,33	613.361	17,34
5. SLTA Sederajat	28.477	19,09	831.321	23,50
6. Perguruan Tinggi (Dipl I/II/III/IV/S1/S2/S3)	12.215	8,19	324.382	9,17
7. Jumlah	149.148		3.536.920	

5.4. Produktifitas Pekerja

Besarnya persentasenya jumlah pekerja yang berpendidikan rendah secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat produktifitas pekerjanya. Selain itu jam kerja pekerja per minggu dapat digunakan sebagai ukuran produktifitas pekerja suatu wilayah. Semakin banyak pekerja yang mempunyai jam kerja penuh maka semakin tinggi produktifitasnya.



Tabel 5.3 Penduduk yang Bekerja dalam Seminggu Kabupaten Pinrang ,2008 (%)

Jam Kerja	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-34 Jam	57,76	41,18	51,84	52,32	44,78
35 Jam ke atas	42,24	58,82	48,16	47,68	55,22
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari total pekerja di Kabupaten Pinrang, pekerja yang bekerja di atas 35 Jam dalam seminggu sebesar 55,22 persen, sedangkan sisanya adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam pada keadaan 2009. Relatif tingginya mereka yang bekerja di atas 35 jam merupakan hal yang sangat menggembirakan, karena hal itu tentunya memberikan kinerja yang semakin membaik.

Mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu jumlahnya masih relatif besar. Golongan pekerja ini termasuk mereka yang disebut dengan setengah pengangguran terpaksa dan yang sukarela. Dengan melihat relatif besarnya mereka ini maka tentunya akan mempengaruhi angka produktifitas tenaga kerja.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang tahun 2009 sebesar 72,6 dan shortfallnya sebesar 1,01 selama periode 2005-2009.
2. Komponen indeks pembangunan manusia tahun 2009, indeks kesehatan sebesar 77,9; indeks pendidikan 75,9 dan indeks daya beli 64,1 persen.
3. Dari ketiga komponen indeks pembangunan manusia di atas, angka indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli indeksinya masih relatif rendah.
4. Selama periode 2005 hingga 2009 indeks pembangunan manusia Kabupaten Pinrang telah mengalami peningkatan. Hal itu dicerminkan oleh peningkatan per tahun sebesar 0,25 persen.
5. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang tahun 2009 sebesar 7,65 persen.
6. Produk domestik regional bruto per kapita atas dasar harga berlaku sekitar 12,8 juta rupiah pada tahun 2009, angka tersebut relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan tahun 2005 yang sebesar 7,3 juta rupiah.
7. Pengeluaran rumah tangga sebulan untuk konsumsi baik makanan maupun bukan makanan sekitar 1.737,7 ribu rupiah pada tahun 2009.
8. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sekitar 96,27 persen dan yang menggunakan air kemasan dan ledeng sebagai sumber air minum sekitar 11,81 persen pada tahun 2009.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa hasil temuan di atas, disarankan beberapa hal antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat masih dibutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih luas, peningkatan status gizi masyarakat terutama bagi bayi dan anak balita serta ibu hamil/menyusui. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih luas berkaitan dengan ketersediaan dan pemerataan sarana/ fasilitas kesehatan. Peningkatan daya tampung fasilitas kesehatan menjadi suatu hal yang penting karena akan memperluas akses kesehatan. Banyaknya jumlah tenaga medis pun menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kesehatan di suatu daerah. Peningkatan status gizi masyarakat juga tidak kalah pentingnya, diharapkan adanya program-program kesehatan yang terpadu dari pemerintah untuk bisa lebih lebih meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Pinrang .
2. Peningkatan program di bidang pendidikan harus terus diupayakan, antara lain melalui pendidikan dan kesehatan gratis, megingat daerah lain juga sedang menggalakkan program tersebut. Pengentasan buta huruf yang telah dilakukan harus terus diprogramkan, karena para penduduk yang telah mengikuti program tersebut berpotensi untuk buta huruf kembali. Kegiatan itu merupakan keterampilan sehingga harus dilakukan secara berkelanjutan.

3. Upaya peningkatan daya beli masyarakat berkaitan dengan perluasan lapangan pekerjaan. Perluasan lapangan pekerjaan akan berhubungan dengan potensi dan daya saing daerah. Potensi daerah Kabupaten Pinrang bertumpu pada sektor pertanian, terutama subsektor tanaman bahan makanan dan perikanan. Dimana sektor ini merupakan sangat berorientasi kepada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sehingga berpotensi dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sub sektor perikanan terutama untuk komoditi rumput laut dan penangkapan ikan di laut mempunyai daya saing yang baik di antara kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan. Dalam rangka mendukung potensi dan daya saing diharapkan kepada pemerintah daerah berusaha bermitra dengan para investor menyediakan industri pengolahan untuk dua komoditi tersebut.